



---

# Laporan Keanggotaan Primo Indo Ikan Larantuka dalam Seafood Savers

---

Ringkasan perkembangan perbaikan perikanan  
oleh PT Primo Indo Ikan Larantuka periode  
November 2017 – April 2018

---

**Saraswati Adityarini - Capture Fisheries Officer for Skipjack,  
Tuna and Tuna Like Commodities**

---

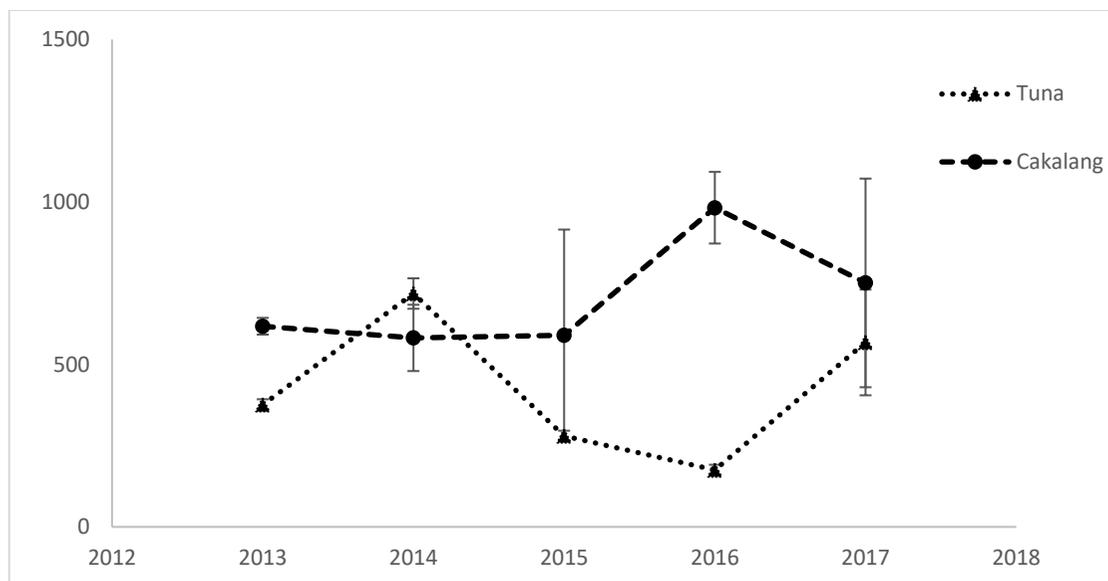
## Informasi Umum

1. **Lokasi** : Kabupaten Flores Timur  
Survey pertama : 8 Oktober 2018  
Survey kedua : 5 Desember 2017  
Jumlah petambak/nelayan : Jumlah armad Pole and Line yang menjadi supply chain PT Primo Indo Ikan Larantuka untuk komoditi yang didaftarkan yaitu cakalang dan yellowfin tuna adal 17 armada.
2. **Praktik budi daya/budi daya**
  - Ukuran minimal panen/tangkap (nama komoditas) : Ikan madidihang/ Yellowfin Tuna minimal 20Kg/ ekor, cakalang 1 kg/ ekor
  - Metode budi daya/penangkapan : Pancing Pole and Line dan Handline/ Pancing Ulur
  - Kisaran harga : Rp 15.000/Kg untuk cakalang dan Rp 45.000/Kg nya untuk tuna

Sistem pembelian langsung dilakukan nelayan ke perusahaan. Dimulai dengan kapten armada pole and line menginfokan ke pihak PT Primo Indo Ikan bahwa akan bersandar dan melakukan menjual hasil tangkapan ke perusahaan. Lokasi bongkar PT Primo Indo Ikan sendiri da di PPI Amagarapati , sehingga staff perusahaan serta petugas QC akan turun ke dermaga. Saat proses bongkar petugas perusahaan akan melakukan penimbangan, pencatatan hasil tangkapan, selain itu diberi individual tagging untuk tuna yang meliputi: tanggal masuk kapal, nama kapal, nomor ikan, berat bersih, grade, bentuk produk dan urutan kapal. Untuk hasil tangkapan cakalang pemberian tagging akan diberikana saat sudah diletakan dalam rak-rak untuk disimpan dalam cold storage di Pabrik, karena jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan tuna yang ditangkap oleh nelayan. Proses grading atau pemilahan sesuai dengan kualitasnya, sudah dilakukan untuk hasil tangkapan yang telah ditimbang. Setelah selesai proses ini selanjutnya hasil tangkapan dibawa ke pabrik dengan jarak kurang lebih 45 menit

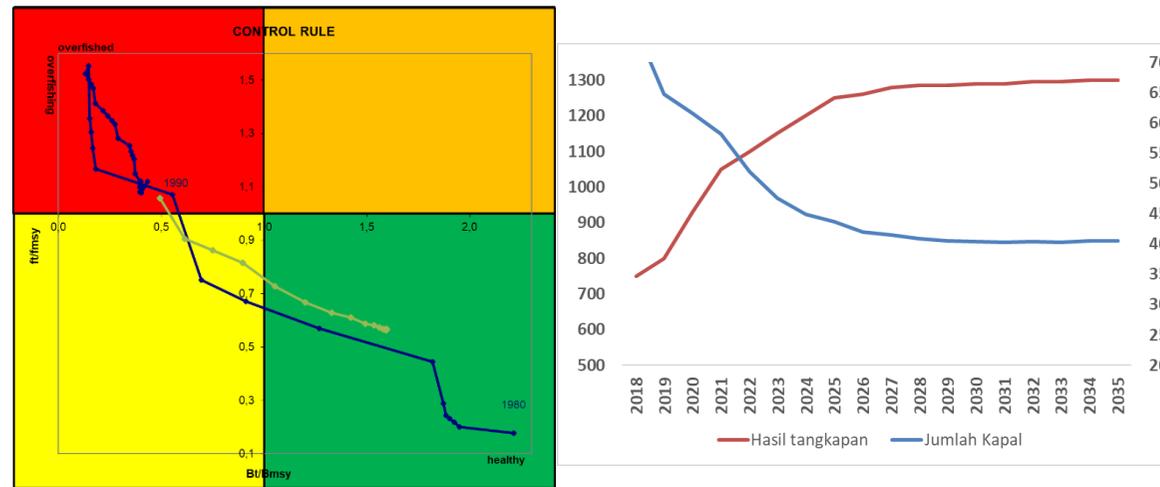
### 3. Kapasitas produksi

Berdasarkan data statistic perikanan tagkap Prov NTT tahun 2016 untuk produksi ikan cakalang Kab. Flores Timur mencapai 935 ton dan untuk ikan yellowfin tuna mencapai 418 ton. Dimana Kabupaten Flores Timur telah berkontribusi sebanyak 22% produksi ikan cakalang dalam produksi ikan cakalang Provinsi NTT, dan sebesar 14% untuk ikan Madidihan Yellowfin Tuna. Sepanjang bulan Mei - Desember tahun 2017 produksi ikan cakalang PT Primo Indo Ikan sebanyak 721.583 Kg ikan cakalang dan untuk ikan madidihang sebanyak 19.212 Kg. Dengan trip penangkapan sebnyak 891 trip, selama Mei- Desember 2017. Bila menggunakan perbandingan produksi PT Primo Indo Ikan pada Mei-Desember 2017 dengan data statistik Kab. Flores Timur bahwa PT Primo Indo Ikan Larantuka telah berontribusi sekitar 77% produksi ikan cakalang sedangkan untuk Yellowfin tuna sebesar 5%.

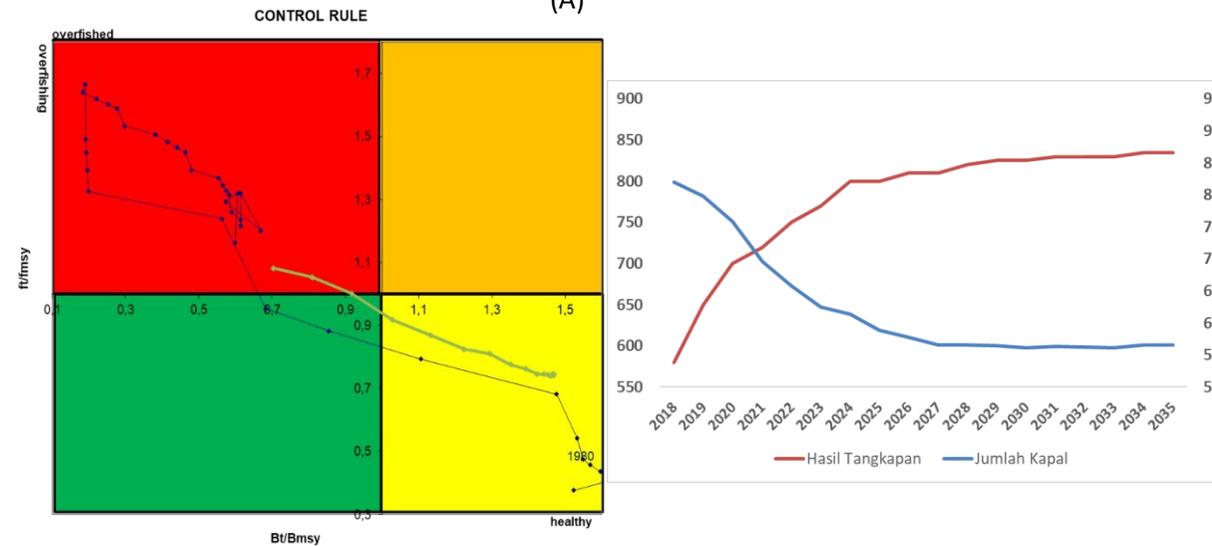


Gambar 1. Grafik CPUE komodii Tuna Cakalang dan Tongkol dari Produksi PT Primo Indo Ikan tahun 2013-2017

Pada rata-rata CPUE dari data yang dikumpulkan dari PT Primo Indo Ikan selama tahun 2013 hingga tahun 2017 untuk komoditi Tuna rata-rata CPUE tertingginya terjadi di tahun 2014 adalah sebesar 718,21 Kg/Trip dan berturut-turut pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan, namun berbeda dengan nilai rata-rata CPUE untuk komoditi cakalang dimana semenjak tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi harga beli ikan tuna yang lebih baik dari harga cakalang di tahun 2014 sehingga nelayan lebih berfokus untuk menangkap ikan tuna dibandingkan mencari ikan cakalang. Selain itu pada tahun 2014 nelayan pole and line mulai sulit mendapatkan umpan hidup, ditambah persaingan harga jual antar ikan umpan hidup dengan harga sebagai ikan konsumsi menjadikan biaya operasional semakin besar. Umpan hidup sendiri sangat berperan penting yang digunakan armada pole and line dalam operasi penangkapannya sehingga kondisi tersebut menjadikan penurunan usaha penangkapan, dimana banyak armada pole and line memilih untuk tidak aktif.



(A)



(B)

Gambar (A) Control Rule pada spesies umpan ikan layang, (B) Control Rule pada spesies umpan ikan tembang

Mempertimbangkan kondisi ketersediaan umpan hidup pole and line yang semakin sulit, yang mengindikasikan stock spesies ikan umpan hidup yaitu ikan laying dan tembang yang semakin menurun, membut perlu adanya pengelolaan spesies umpan hidup yang diperlengkapi dengan alat pengaturannya. Dalam skema strategi pemanfaatan alat pengaturan dalam rangka mengelola stock yang sebeumnya telah dalam kondisi menurun dan memerukan pengaturan untuk memulihkan kembali stocknya. Nantinya pengaturan dilakukan baik dari inputnya yaitu pengaturan jumlah *effortnya* (trip, unit armada atau unit alat tangkap), maupun dari outputnya dimana adanya pengaturan kuota hasil tangkapannya.

Dari gambar (A) kobe plot diatas terlihat perderahan kondisi stock ikan laying saat dilakukan pengaturan dari sisi inputnya (jumlah armada), yang diproyeksikan hingga tahun 2035. Dimana awalnya stok ikan laying yang berda pada kondisi overfishing dan overfished yang kemudian saat dilakukan pengaturan dan diproyeksi terjadi pergerakan ke kuadran hijau dimana diindikasikan stock telah mengalami recovery mulai tahun 2029. Demikian juga dengan pengaturan untuk spesies ikan tembang dimana pengaturan yang dilakukan dari sisi input yaitu pengurangan jumlah armada hingga tahun 2029 yang diikuti meningkatnya hasil tangkapan dan kondisi hasil tangkapan yang stabil terjadi mulai dari tahun proyeksi 2019 hingga 2035. Namun implementasi pengaturan ini harus dipersiapkan bertahap dengan berbagai alternative sebagai langkah solutif dampak dari sektor dan pihak yang mengalami dampak dari pengaturan tersebut. Dan proyeksi pengaturan ini dapat dibuat lebih lama dimana konsekuensinya pemulihan juga akan lama terjadi.

#### 4. Keterangan tambahan

- a. Telah dilakukan pelatihan BMP Cakalang dan data compliance kepada nelayan supply chain PT Primo Indo Ikan sebanyak 23 orang pada 5 Desember 2017, dengan nilai rata-rata pretest 56,7 protest 69,6 dan terlihat terdapat peningkatan pemahaman untuk cara penangkapan cakalang dengan pole and line yang ramah lingkungan sekitar 19 %. Dan nilai compliencenya sebesar 63,65%..
- b. PT Primoo Indo Ikan Larantuka telah melakukan pencatatan dengan format logbook pemeritah dan dilaporkan untuk keperluan pengurusan SHTI/ Catch Certificat karena bersifat mandatory. Disampaikan oleh Pihak PT Primo Indo Ikan Larantuka bahwa kedepan akan semakin memperkuat pencatatan di level nelayan tidak hanya di Perusahaan saja..
- c. Dampak dari UU 23/2014 begitu pula dengan proses pengurusan perijinan dari perikana Pole and Line di Larantuka, dimana tidak efisien dari sisi waktu, tenaga dan materi, dimana untuk proses pengurusan masih dilakukan di DKP Provinsi NTT. Namun sayangnya di kabupaten sendiri belum ada UPT atau keterwakilan dari DKP Provinsi untuk mengurangi kendala tersebut, DKP Kab. Flores Timur juga sudah tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengeluarkan perijinan atau dokumen yang diperlukan untuk menunjang kegiatan penangkapan nelayan pole and line.

| No | Nama Kapal          | Tanda Selar         |
|----|---------------------|---------------------|
| 1  | Yulien 01           | GT. 26 No. 1164/Mma |
| 2  | Flotim 33           | GT. 22 No. 85/OOf   |
| 3  | Inka 698            | GT.30 No. 56/00a    |
| 4  | Flotim 12B          | GT. 22 No. 82/OOf   |
| 5  | Flotim19            | GT.22 No.10/00f     |
| 6  | Ard 07              | GT 20 No. 57/OOf    |
| 7  | NB 47 Delvino       | GT. 6 No. 761/K.41  |
| 8  | NB 28/ Deo Gratia   | GT. 13 No. 113/00f  |
| 9  | Flotim 09           | GT. 22 No. 15/OOf   |
| 10 | NB 63               | GT. 13 No. 112/OOf  |
| 11 | Bahtera Flotim 3-13 | GT. 19 No.6966/Bc   |
| 12 | NB 119              | GT. 13 No. 121/OOf  |
| 13 | Bahtera Flotim 2-13 | GT. 19 No.6965/Bc   |
| 14 | Flotim 30           | GT. 22 No. 84/OOf   |
| 15 | Flotim31            | GT. 22 No. 88/Oof   |
| 16 | Bahtera Krukab      | GT. 26 No. 496/Ab   |
| 17 | Anugerah Mina 09    | GT. 13 No. 105/OOf  |

Rincian evaluasi keanggotaan PT Primo Indo Ikan Larantuka berdasarkan *Fisheries Improvement Program* (FIP) yang telah dilaksanakan:

| DETAIL ACTION<br>(for the Seafood Savers member) | OUTPUT AND INDICATOR<br>FOR DETAIL ACTION<br>(for the Seafood Savers<br>member) | ACTION LEAD &<br>PARTNERS | SEAFOOD<br>SAVERS<br>stage | HASIL EVALUASI | RENCANA TINDAK LANJUT/<br>KENDALA |
|--|---|---------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
|--|---|---------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|

|   |  |  | INTERMEDIATE |   |  |
|---|--|--|--------------|---|--|
| <p>1. pengambilan data logbook (Analisa CPUE) dilanjutkan untuk alat tangkap handline dan pole and line</p> <p>*LINK 1.2.3 A,B</p> <p>pendataan ini didahului dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- identifikasi kapal anggota PT Primo Indo Ikan yang menggunakan alat tangkap handline dan pole and line</li> <li>- melaksanakan identifikasi apakah ada kapal supplier PT Primo Indo yang terdaftar di RFMO</li> </ul> | <p>data logbook tersedia dan terupdate secara periodik data logbook meliputi (target dan non target) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- berat Tuna</li> <li>- panjang tuna</li> <li>- tangkapan sampingan</li> <li>- umpan</li> <li>- kematangan gonad tuna</li> <li>- jumlah armada (effort)</li> <li>- pendataan komposisi tangkapan handline dan pole and line</li> </ul> | <p>PIC : WWF-Indonesia</p> <p>PIV : PT Primo Indo Ikan</p> <p>action : Nelayan anggota</p> |              | <p>PT Primo Indo Ikan Larantuka telah melakukan pencatatan dengan format logbook pemerintah dan dilaporkan untuk keperluan pengurusan SHTI/ Catch Certificat karena bersifat mandatory. Disampaikan oleh Pihak PT Primo Indo Ikan Larantuka bahwa kedepan akan semakin memperkuat pencatatan di level nelayan tidak hanya di Perusahaan saja.</p> | <p>Meningkatkan pencatatan logbook oleh nelayan anggota PT Primo Indo Ikan</p>   |
| <p>2. menghubungkan data logbook dengan DKP prov NTT</p> <p>*LINK 1.2.3 A,B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menyelaraskan form logbook dengan DKP Kabupaten/ Propinsi dan Komnas Kajiskan/ Pusrisikan</li> </ul>   | <p>data logbook masuk ke dalam sistem pendataan statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Flores Timur dan NTT untuk mendukung buku statistik perikanan Kabupaten dan propinsi</p>  | <p>WWF-Indonesia, DKP Prov NTT, DKP Kab Flores Timur</p>                                   |              | <p>Secara tidak langsung belum, tapi PT Primo Indo Ikan telah melaporkan logbook untuk keperluan pengurusan SHTI/ Catch Certificat karena bersifat mandatory</p>  | <p>Perlu adanya pertemuan untuk membahas sinkronisasi dan integrasi pencatatan dan skema pelaporan pendataan perikanan dari nelayan ke tingkat kabupaten dan provinsi.</p> |
| <p>3. Advokasi kepada DKP Kab Flores Timur untuk memiliki program enumerator untuk pendataan Tuna</p> <p>*LINK 1.2.3 C</p>  | <p>Logbook dijalankan oleh DKP setempat</p>  | <p>DKP Kab Flores Timur, DKP Prop NTT, WWF-Indonesia</p>                                   |              | <p>Belum dilaksanakan sepenuhnya</p>  | <p>Perlu adanya pertemuan untuk membahas sinkronisasi dan integrasi pencatatan dan skema pelaporan pendataan perikanan dari nelayan ke tingkat kabupaten dan provinsi.</p> |

|   |  |  |  |                                      |  |
|---|--|--|--|--------------------------------------|--|
| <p>1. Melakukan sosialisasi kepada anggota nelayan tentang :</p> <p>a.KEPMEN KP no 107 tahun 2015 mengenai RPP-TCT dan surat edarannya</p> <p>b. Kepmen 47/ 2016</p> <p>*cakupan nelayan lebih besar lebih baik</p> <p><b>*LINK 1.2.2 B, 1.2.3 C, 2.3.2.B</b></p> <p>- menyesuaikan proses penangkapan sesuai dengan pengendalian penangkapan (control rule ) dan Harvest Strategy tuna di WPP 713 oleh Subdit ZEEI</p> <p>- untuk armada yang beroperasi di WPP 573 agar menyesuaikan mekanisme control rule yang dibuat oleh IOTC dengan catatan apabila kapal sudah terdaftar dan mekanisme pengendalian penangkapan sudah tersedia dan diadopsi oleh pemerintah Indonesia</p> | <p>Nelayan penangkap tuna mengerti, memahami, dan menjalankan aturan-aturan tentang garis besar isi dalam KEPMEN KP no 107 tahun 2015 mengenai RPP-TCT dan Kepmen 47/ 2016</p> | <p>DKP Kab.Flores Timur,DKP Propinsi NTT, WWF Indonesia, Badan Penyuluh PT Primo Indo Ikan</p> |  | <p>Belum dilaksanakan sepenuhnya</p> | <p>Diadakannya pertemuan untuk mensosialisasikan nelayan anggota PT Primo Indo Ikan untuk menjalankan aturan-aturan tentang garis besar isi dalam KEPMEN KP no 107 tahun 2015 mengenai RPP-TCT dan Kepmen 47/ 2016</p> |
| <p>1. Melaksanakan konsultasi dokumen strategi pemanfaatan tuna target (yang disusun pada P1.1.1) di tingkat stakeholder</p> <p><b>*LINK 3.1.1</b></p>  | <p>Peraturan pemanfaatan spesies tuna target yang didukung oleh nelayan dan di dalamnya meliputi adanya :</p> <p>(1) rencana pengurangan pemanfaatan (bila perlu) jika</p>     | <p>DKP Kab.Flores Timur, DKP Propinsi NTT, dan Nelayan</p>                                     |  | <p>Belum dilaksanakan sepenuhnya</p> | <p>Perlu pertemuan untuk membahas action lans PT Primo Indo Ikan sekaligus untuk menghimpun masukan dan esepkatan melaksanakan bersama lintas stakeholder.</p>   |

|   |   |                           |  |  |  |
|---|---|---------------------------|--|--|--|
|   | status stok sudah mendekati limit reference point,<br>(2) mengadopsi prinsip ketidakpastian (uncertainties), kehati-hatian,<br>(3) mekanisme evaluasi reguler terhadap performa pengelolaan yang dilakukan oleh pihak internal dan eksternal terkait serta<br>(4) tujuan jangka pendek dan jangka panjang |                           |  |  |  |
| 2. Perusahaan menetapkan kebijakan internal untuk membeli tuna hasil tangkapan dengan handline sesuai dengan hasil dalam dokumen strategi pemanfaatan<br><br><b>*LINK 1.2.1, 1.2.3 C, 2.3.2.B</b> | terdapat dokumen kebijakan internal perusahaan untuk membeli tuna hasil tangkapan dengan handline sesuai dengan hasil dalam dokumen strategi pemanfaatan  | PT Primo Indo Ikan        |  | Sudah ada kebijakan internal perusahaan terkait pengaturan hasil tangkapan untuk ukuran ikan cakalang min.1 Kg keatas, untuk ikan madidihang min. 20 Kg keatas | Setelah tersedianya dokumen Strategi pemanfaatan cakalang dan tuna Nasional yang final, kemudian disosialisasikan untuk diadopsi.  |
| 1. membuat protokol pengumpulan data (mendukung aktifitas 1.1.1)  | tersedianya protokol pengumpulan data yang telah disepakati dengan Komaskajiskan, Pusrisikan, DKP Propinsi, dan Kabupaten   | WWF                       |  | Form pendataan masih menggunakan dengan fprm logbook sesuai dengan Permen KP 48/2014, namun masih untuk skala industrial                                       | Akan dikembangkan form pendataan disesuaikan dengan skala penangkapan dari armada Pole and Line di Flores Timur yang kemudian dikonsultasikan dan disepakati oleh Komaskajiskan, Pusrisikan, DKP Propinsi, dan Kabupaten |
| 2. dilakukannya aktivitas pengumpulan data secara reguler<br><br><b>*LINK 1.1.1. A,B</b>  | tersedia data yang sudah dianalisis secara ilmiah   | Nelayan, DKP.Propinsi NTT |  | Perusahaan telah ikut mendukung dalam beberapa kajian stok termasuk analisa dugaan stok dan Analisa Harvet   | Perusahaan akan berpartisipasi dalam beberapa kajian mendukung implementasi action plans ini   |

|  |  |                               |  |   |  |
|--|--|-------------------------------|--|---|--|
|  |  |                               |  | Strategy , dengan turut serta melakukan pengumpulan data secara reguler.  |  |
| 3. kebijakan internal perusahaan untuk mengarahkan pengepul menyediakan dokumen pencatatan hasil tangkapan tuna pada saat menjual tuna ke perusahaan<br><br><b>*LINK 1.1.1 C</b> | dokumen pencatatan disertakan pada setiap transaksi dengan perusahaan oleh pengepul  | PT Primo Indo Ikan ,          |  | Perusahaan telah menerapkan sistem pencatatan langsung dengan nelayan tanpa perantara pengepul dan wajib lengkap dokumen dan perijinan untuk setiap nelayan kapal anggota                                 | Perusahaan akan membangun kebijakan internal untuk mendukung penguatan pencatatan dan pelaporan oleh nelayan anggota |
| melakukan penilaian terhadap aspek-aspek pada prinsip 1.2.4 sesuai dengan prasyarat disamping  | dokumen hasil penilaian tersedia   | WWF Indonesia learning center |  | Perusahaan telah berkontribusi dalam pengumpulan data untuk kajian Analisa stok spesies perikanan umpan tuna  |  |
| 1. Melakukan kajian RBF untuk spesies primer dari hasil penangkapan tuna (relevan dengan 1.1.1)  | Tersedianya laporan RBF untuk spesies primer meliputi produktivitas spesies primer (rerata umur saat matang gonad, rerata ukuran pada saat matang gonad, rerata umur maksimal, rerata ukuran maksimal, fekunditas, strategi reproduksi, tropik level) serta kerentanan /susceptabilitas spesies primer (areal overlap, vertikal overlap, selektivitas, kematian pasca penangkapan) | WWF Indonesia learning center |  | Perusahaan telah berkontribusi dalam proses pengambilan data untuk kajian RBF spesies primer cakalang pole and line di Kabupaten Flores Timur yang dilakukan oleh Universitas Kristen Artha Wacana Kupang | Dilakukan identifikasi ulang untuk lokasi yang baru di Bali  |

|  |   |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|---|
| 2. Melakukan konsultasi publik untuk mengkaji kerentanan spesies terhadap overfishing (kajian PSA) untuk spesies primer (relevan dengan 1.1.1)   | Tersedianya informasi mengenai status kerentanan spesies terhadap overfishing serta strategi pengelolaannya | WWF Indonesia learning center                                |  | Belum dilakukan  | Dilakukan identifikasi ulang untuk lokasi yang baru di Bali |
| relevan dengan P1.1.1 bahwa untuk spesies primer telah dilaksanakan melalui Kajian RBF hasil kajian dicantumkan dalam dokumen harvest strategy   | Hasil rekomendasi pengelolaan masuk ke dalam dokumen harvest strategy                                       | Learning Center, Nelayan, DKP Kab Flores Timur, Propinsi NTT |  | Belum dilakukan  | Dilakukan identifikasi ulang untuk lokasi yang baru di Bali |
| konsultasi publik untuk rekomendasi dari hasil kajian RBF (relevan dengan P1.1.1)<br><br>konsultasi publik ini diperkuat dengan peraturan dan atau kajian yang berhubungan dengan spesies primer dalam proses penangkapan Pole and Line dan handline | hasil rekomendasi pengelolaan disepakati oleh stakeholder   | Learning Center, Nelayan, DKP Kab Flores Timur, Propinsi NTT |  | Belum dilakukan  | Dilakukan identifikasi ulang untuk lokasi yang baru di Bali |
| Melakukan kajian RBF (PSA, SICA, CSA) terhadap spesies primer (relevan dengan kajian RBF yang dilaksanakan untuk P1.1.1)   | rekomendasi pengelolaan tersedia melalui hasil kajian RBF yang relevan dengan P1.1.1                        | Learning Center, Nelayan, DKP Kab Flores Timur, Propinsi     |  | Telah dilakukan, dan Perusahaan telah berkontribusi dalam proses pengambilan data untuk kajian RBF spesies primer cakalang pole and line di Kabupaten Flores Timur yang dilakukan oleh Universitas Kristen Artha Wacana Kupang | Dilakukan identifikasi ulang untuk lokasi yang baru di Bali |

|  |  |  |  |   |   |
|--|--|--|--|---|---|
| konsultasi publik untuk rekomendasi dari hasil kajian RBF (relevan dengan P1.1.1)  | hasil rekomendasi pengelolaan disepakati oleh stakeholder  | Learning Center, Nelayan, DKP Kab Flores Timur, Propinsi |  | Belum dilakukan   | Dilakukan identifikasi ulang untuk lokasi yang baru di Bali |
| 1. Melakukan kajian RBF untuk spesies sekunder dari hasil penangkapan tuna (yang relevan dengan 1.1.1)<br>- termasuk ikan umpan                  | Tersedianya laporan RBF untuk spesies primer meliputi produktivitas spesies sekunder (rerata umur saat matang gonad, rerata ukuran pada saat matang gonad, rerata umur maksimal, rerata ukuran maksimal, fekunditas, strategi reproduksi, tropik level) serta kerentanan /susceptabilitas spesies primer (areal overlap, vertikal overlap, selektivitas, kematian pasca penangkapan) | Learning Center, Nelayan, DKP Kab Flores Timur, Propinsi |  | Belum dilaksanakan kajian RBF untuk spesies sekunder termasuk untuk spesies ika umpan | Dilakukan identifikasi ulang untuk lokasi yang baru di Bali |
| 2. Melakukan konsultasi publik untuk mengkaji kerentanan spesies terhadap overfishing (kajian PSA) untuk spesies sekunder (relevan dengan 1.1.1) | Tersedianya informasi mengenai status kerentanan spesies terhadap overfishing serta strategi pengelolaannya  | Learning Center, Nelayan, DKP Kab Flores Timur, Propinsi |  | Belum dilakukan   | Dilakukan identifikasi ulang untuk lokasi yang baru di Bali |
| relevan dengan P1.1.1 bahwa untuk spesies primer telah dilaksanakan melalui Kajian RBF hasil kajian dicantumkan dalam dokumen harvest strategy   | Hasil rekomendasi pengelolaan masuk ke dalam dokumen harvest strategy  | Learning Center, Nelayan, DKP Kab Flores Timur, Propinsi |  | Belum dilakukan   | Dilakukan identifikasi ulang untuk lokasi yang baru di Bali |
| konsultasi publik untuk rekomendasi dari hasil kajian RBF (relevan dengan P1.1.1)  | hasil rekomendasi pengelolaan disepakati oleh stakeholder  | Learning Center, Nelayan, DKP Kab Flores Timur, Propinsi |  | Belum dilakukan   | Dilakukan identifikasi ulang untuk lokasi yang baru di Bali |

|  |   |  |  |                 |   |
|--|---|--|--|-----------------|---|
| Melakukan kajian RBF (PSA, SICA, CSA) terhadap spesies primer (relevan dengan kajian RBF yang dilaksanakan untuk P1.1.1) | rekomendasi pengelolaan tersedia melalui hasil kajian RBF yang relevan dengan P1.1.1  | Learning Center, Nelayan, DKP Kab Flores Timur, Propinsi |  | Belum dilakukan | Dilakukan identifikasi ulang untuk lokasi yang baru di Bali |
| konsultasi publik untuk rekomendasi dari hasil kajian RBF (relevan dengan P1.1.1)  | hasil rekomendasi pengelolaan disepakati oleh stakeholder   | Learning Center, Nelayan, DKP Kab Flores Timur, Propinsi |  | Belum dilakukan | Dilakukan identifikasi ulang untuk lokasi yang baru di Bali |
| Melakukan kajian biologis dari spesies ETP yang ada di wilayah penangkapan khususnya WPP 713 dan 573                     | Tersedianya informasi mengenai produktivitas spesies ETP (rerata umur saat matang gonad, rerata ukuran pada saat matang gonad, rerata umur maksimal, rerata ukuran maksimal, fekunditas, strategi reproduksi, tropik level) serta kerentanan /susceptabilitas spesies ETP (areal overlap, vertikal overlap, selektivitas, kematian pasca penangkapan) | Universitas, Nelayan                                     |  | Belum dilakukan | Dilakukan identifikasi ulang untuk lokasi yang baru di Bali |
| Melakukan konsultasi publik untuk mengkaji kerentanan spesies terhadap overfishing (kajian PSA) untuk spesies ETP        | Tersedianya informasi mengenai status kerentanan spesies terhadap overfishing serta strategi pengelolaannya   | Universitas, DKP Kab, WWF , Nelayan                      |  | Belum dilakukan | Dilakukan identifikasi ulang untuk lokasi yang baru di Bali |
| melakukan kajian akademis untuk pembuatan strategi pengelolaan spesies ETP<br><br>*LINK 2.3.3                            | tersedianya kajian akademis untuk pembuatan strategi pengelolaan spesies ETP yang meliputi strategi pemulihan stok spesies ETP  | Universitas, WWF   |  | Belum dilakukan | Dilakukan identifikasi ulang untuk lokasi yang baru di Bali |

|   |   |  |  |                    |   |
|---|---|--|--|--------------------|---|
| Melaksanakan konsultasi draft peraturan pengelolaan spesies ETP di tingkat nelayan  | peraturan pengelolaan spesies ETP didukung oleh nelayan   | WWF, Universitas, Nelayan                      |  | Belum dilaksanakan | Setelah dilakukan kajian untuk strategi pengelolaan spesies ETP |
| Melaksanakan konsultasi draft peraturan pengelolaan spesies ETP di tingkat kabupaten / Kota<br><br><b>*LINK 2.4.2 C</b>                                     | draft mendapat persetujuan di tingkat kabupaten / kota  | WWF, Universitas, Nelayan, DKP Kab             |  | Belum dilaksanakan | Setelah dilakukan kajian untuk strategi pengelolaan spesies ETP |
| Mendorongkan terbentuknya peraturan di tingkat kabupaten terkait dengan pengelolaan spesies ETP   | Tersedianya peraturan yang mendukung pengelolaan perikanan dari spesies ETP   | DKP Kab, WWF, Universitas, Nelayan             |  | Belum dilaksanakan | Setelah dilakukan kajian untuk strategi pengelolaan spesies ETP |
| melakukan kajian komposisi tangkapan dari data logbook yang tersedia yang menyebutkan ada/ tidaknya spesies ETP yang tertangkap<br><br><b>*LINK 2.3.2.A</b> | tersedianya laporan kajian komposisi tangkapan dari data logbook yang menyebutkan ada/ tidaknya spesies ETP yang tertangkap | Universitas, WWF                               |  | Belum dilakukan    | Dilakukan identifikasi ulang untuk lokasi yang baru di Bali     |
| melakukan kajian RBF terhadap dampak aktivitas pemanfaatan spesies tuna target menggunakan alat tangkap handline  | tersedianya laporan ilmiah mengenai dampak aktivitas pemanfaatan spesies tuna target menggunakan alat tangkap handline      | Learning Center                                |  | Belum dilakukan    | Dilakukan identifikasi ulang untuk lokasi yang baru di Bali     |
| Melaksanakan sosialisasi peraturan pengelolaan habitat di tingkat nelayan dari hasil kajian RBF pada poin 2.4.1   | peraturan pengelolaan habitat didukung oleh nelayan   | WWF, PT Primo Indo Ikan , Universitas, Nelayan |  | Belum dilakukan    | Dilakukan identifikasi ulang untuk lokasi yang baru di Bali     |

|   |   |  |  |                 |   |
|---|---|--|--|-----------------|---|
| Melaksanakan konsultasi draft peraturan pengelolaan habitat di tingkat KKPN Laut Sawu   | draft mendapat persetujuan di tingkat KKPN Laut Sawu  | WWF, PT Primo Indo Ikan , Universitas, Nelayan   |  | Belum dilakukan | Dilakukan identifikasi ulang untuk lokasi yang baru di Bali |
| Mendorongkan terbentuknya peraturan di tingkat KKPN Laut Sawu terkait dengan pengelolaan habitat<br><br><b>*LINK 2.3.2C,D</b>                       | Tersedianya peraturan yang mendukung pengelolaan perikanan dari habitat                                       | WWF, PT Primo Indo Ikan , Universitas, Nelayan   |  | Belum dilakukan | Dilakukan identifikasi ulang untuk lokasi yang baru di Bali |
| melakukan kajian RBF (CSA-Consequence Spatial Analysis) terhadap dampak aktivitas pemanfaatan spesies tuna target menggunakan alat tangkap handline | tersedianya laporan ilmiah mengenai dampak aktivitas pemanfaatantuna target menggunakan alat tangkap handline | Learning Center                                  |  | Belum dilakukan | Dilakukan identifikasi ulang untuk lokasi yang baru di Bali |
| melakukan kajian RBF terhadap status ekosistem  | tersedianya laporan ilmiah mengenai status ekosistem dari kajian RBF  | Learning Center                                  |  | Belum dilakukan | Dilakukan identifikasi ulang untuk lokasi yang baru di Bali |
| Melakukan konsultasi publik untuk mengkaji ekosistem spesies Tuna target tangkapan menggunakan RBF (SICA)   | Tersedianya informasi mengenai status ekosistem spesies Tuna target tangkapan serta strategi pengelolaannya   | Learning Center, DKP Kab, DKP Prop, WWF, Nelayan |  | Belum dilakukan | Dilakukan identifikasi ulang untuk lokasi yang baru di Bali |
| konsultasi publik tentang zonasi  | tersedianya legalitas zona larangan dan peta zonasi pemanfaatan tuna  | Learning Center, DKP Kab, DKP Prop, WWF, Nelayan |  | Belum dilakukan | Dilakukan identifikasi ulang untuk lokasi yang baru di Bali |

|  |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|---|--|
| melakukan sosialisasi zona larangan kepada masyarakat termasuk membangun alat-alat komunikasinya (billboard, poster, pamflet)  | masyarakat memahami dan mematuhi peraturan tentang zona larangan   | Learning Center, DKP Kab, DKP Prop, WWF, Nelayan PT Primo Indo Ikan |  | Belum dilakukan   | Dilakukan identifikasi ulang untuk lokasi yang baru di Bali  |
| melakukan kajian pengumpulan data yang dilakukan secara periodik   | tersedianya laporan ilmiah yang meliputi dampak pemanfaatan spesies target terhadap elemen ekosistem kunci (mangsa utama, predator, kompetitor, komposisi komunitas) setiap 2 tahun  | Universitas, Nelayan, WWF   |  | Belum dilakukan   | Dilakukan identifikasi ulang untuk lokasi yang baru di Bali  |
| <p>1. Melanjutkan proses advokasi ikan umpan di Larantuka kepada DKP Kab dan Propinsi</p> <p>2. Mendorongkan pendaftaran rumpon sesuai regulasi dari KKP terutama berkaitan dengan amnesti rumpon yang akan dilaksanakan pada tahun 2018</p> |  | Learning center, WWF  |  | Belum dilakukan   | Dilakukan identifikasi ulang untuk lokasi yang baru di Bali  |
| <p>Mendorongkan penguatan kapasitas nelayan anggota dalam skema pengelolaan perikanan</p> <p><b>*LINK 3.2.3</b></p>  | <p>1. legalitas kelompok Nelayan anggota Flores Timur tersedia</p> <p>2. legalitas praktik perikanan oleh nelayan anggota (surat keterangan terdaftar, ijin penangkapan, pencatatan)</p> <p>3. Terwujudnya skema pengelolaan perikanan selain pemantauan kawasan</p> | WWF PT Primo Indo Ikan  |  | Perusahaan sangat mendukung dalam membantu nelayan anggota untuk pengurusan kelengkapan dokumen perijinan | Perusahaan akan membangun kebijakan internal untuk mendukung penguatan pencatatan dan pelaporan oleh nelayan anggota |

|   |   |   |  |  |   |
|---|---|---|--|--|---|
|   | pemanfaatan dari anggota nelayan penangkap tuna di Flores Timur   |   |  |  |   |
| memperkuat peran KKPN Laut Sawu melalui team building, training tentang pengelolaan perikanan berkelanjutan untuk mendukung peran sebagai lembaga pengelola Tuna di Flores Timur dan sekitarnya | menguatnya peran dan leadership KKPN Laut Sawu untuk berperan sebagai Lembaga pengelola   | WWF<br>PT Primo Indo Ikan                           |  | Belum dilakukan  | Dilakukan identifikasi ulang untuk lokasi yang baru di Bali   |
| Mendorongkan terbentuknya POKMASWAS di tingkat KKPN Laut Sawu<br><br>*LINK 3.1.2  | terbentuknya POKMASWAS di tingkat kabupaten/kota yang memiliki skema pemantauan, pengaturan dan pengawasan terhadap pengelolaan tuna serta dibekali dengan kewenangan untuk penegakan peraturan pengelolaan | WWF<br>DKP Kabupaten, Nelayan<br>PT Primo Indo Ikan |  | DKP Provinsi NTT telah mengesahkan sebanyak 17 POKMASWAS di Flores Timur. Dan total ada 264 POKMASWAS di NTT | Perlu dilakukan penguatan kelembagaan POKMASWAS dan skema pemantauan, pengaturan dan pengawasannya agar peran mereka dan program pemantauan, pengaturan dan pengawasan lebih efektif. |
| memasukkan poin pengawasan/ evaluasi reguler ke dalam RPP Tuna tingkat Nasional<br><br>*LINK 3.1.1  | poin pengawasan/ evaluasi reguler masuk ke dalam RPP Tuna tingkat Nasional (misalnya 1 tahun sekali)  | Universitas, BPPL, WWF                              |  | Belum dilaksanakan   | Akan dicoba didorongkan dalam beberapa pertemuan pembahasan pengelolaan perikanan tuna termasuk saat pertemuan review FIP tuna nasional.  |